



# *Reformasi Subsidi Bahan Bakar Fosil dan Usaha Kecil Menengah (UKM): Dampak dan Alternatif Tanggapan*

*Tulus Tambunan Pusat Studi Industri, UKM dan Persaingan Bisnis, USAKTI*

*Briefing note ini meneliti hubungan antara reformasi subsidi bahan bakar fosil dengan usaha kecil menengah yang banyak terdapat di Indonesia. Bagaimana pengaruh reformasi subsidi bahan bakar fosil terhadap UKM? Apa yang kita ketahui tentang dampak reformasi serupa di masa lalu? Catatan ini diakhiri dengan mengidentifikasi wilayah-wilayah yang perlu diteliti lebih lanjut serta tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah dan UKM untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari reformasi subsidi bahan bakar fosil.*

## *Pendahuluan*

Di Indonesia, subsidi energi khususnya subsidi bahan bakar secara tradisional memainkan peranan penting dalam menentukan biaya hidup dan biaya menjalankan usaha. Namun dalam 10 tahun terakhir, meningkatnya harga minyak dunia yang seiring dengan peningkatan permintaan bahan bakar telah membuat subsidi tidak lagi terjangkau dan mengharuskan dilakukannya sejumlah reformasi mendasar. Meskipun hal ini diperlukan karena alasan fiskal, Indonesia memiliki populasi rumah tangga berpendapatan rendah yang cukup signifikan. Ini membuat subsidi bahan bakar menjadi lebih dari sekadar isu ekonomi, namun juga menjadi inti perdebatan sosial dan politik kontroversial.

Tujuan makalah ini adalah untuk menelusuri pertanyaan berikut: apakah reformasi subsidi bahan bakar fosil berdampak berarti bagi usaha kecil dan menengah (UKM)?

Usaha kecil menengah merupakan bagian besar dari usaha yang ada di Indonesia dan berkontribusi amat signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja secara total. UKM juga amat penting dalam pengurangan kemiskinan. Oleh karenanya, dampak dari reformasi subsidi bahan bakar fosil atau peningkatan harga bahan bakar yang menimpa UKM akan berperan amat signifikan dalam menentukan kondisi umum kesejahteraan sosial dan ekonomi.



Makalah ini dimulai dengan sejumlah informasi mendasar tentang UKM di Indonesia dan menjelaskan dua pendekatan analitis untuk menelusuri bagaimana UKM-UKM terkena dampak reformasi subsidi energi: pertama, sejauh mana berbagai jenis UKM melaporkan harga energi sebagai masalah; kedua, melalui pengaruh energi dalam struktur biaya UKM. Makalah ini kemudian juga menelusuri bagaimana UKM-UKM yang baru-baru ini terkena dampak peningkatan harga bensin dan solar pada Juni 2013. Di akhir tulisan ini disampaikan sejumlah rekomendasi mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dapat diambil pemerintah dan UKM untuk memastikan UKM tidak dirugikan secara signifikan oleh kenaikan harga energi.

## UKM di Indonesia: Latar Belakang

Sebagaimana di banyak negara berkembang, terdapat setidaknya tiga alasan utama mengapa usaha kecil (termasuk mikro) dan menengah amat penting di Indonesia.

Alasan pertama adalah dari segi jumlah. Jumlah UKM amat banyak – menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM (UKM, 2013), ada sekitar 56,5 juta UKM di Indonesia pada 2012. UKM juga merupakan unit usaha padat karya yang utamanya menggunakan tenaga kerja berpendidikan rendah. Oleh karena itu, UKM memainkan peranan penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pada gilirannya turut mengurangi kemiskinan.

Kedua, UKM dan khususnya perusahaan kecil (UK) tersebar luas di banyak wilayah pedesaan. Ini berarti usaha-usaha kecil memiliki arti penting bagi perekonomian pedesaan. Usaha kecil berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.

Ketiga, UKM memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, yang tidak terbatas pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) Indonesia saja. UKM juga membantu mendiversifikasi ekonomi Indonesia dan menciptakan sektor ekspor bernilai selain sektor migas. Hal ini khususnya diwakili oleh produk-produk seperti furnitur, garmen, alas kaki, serta berbagai produk kreatif dan kerajinan tangan lainnya.

Namun UKM di Indonesia dan di banyak negara berkembang lainnya berbeda dengan UKM di negara-negara maju. Sekitar 99 persen UKM di Indonesia merupakan perusahaan amat kecil atau mikro yang memiliki ciri-ciri berikut:

- Tidak terdaftar dan beroperasi di sektor informal.
- Mayoritas berada di wilayah pedesaan.
- Tidak mengadopsi sistem organisasi, manajemen dan pembukuan konvensional/modern.
- Menggunakan terutama pekerja berbayar berpendidikan rendah dan anggota keluarga yang tidak dibayar.

Disebabkan ciri-ciri ini, tidak mengherankan jika kebanyakan perusahaan tersebut berkinerja buruk (misalnya: produktivitas rendah dan memproduksi barang berkualitas rendah) serta mengalami kesulitan mengakses berbagai prasyarat yang diperlukan, termasuk modal, tenaga kerja berkualitas, teknologi dan informasi, serta akses kepada pasar domestik dan ekspor.

## Arti Penting Energi di Antara Berbagai Masalah yang Dihadapi UKM Saat Ini

UKM Indonesia (khususnya usaha kecil) seringkali menghadapi berbagai kendala yang membatasi kemampuan mereka untuk bertahan atau tumbuh, termasuk hambatan yang bersifat kelembagaan. Berbagai hambatan yang ada



dapat berbeda di setiap daerah, atau antara wilayah pedesaan dan perkotaan, antara sektor dengan subsektor dan antara setiap perusahaan di dalam suatu sektor atau subsektor atau daerah. Namun ada sejumlah hambatan yang umum ditemukan di semua UKM, termasuk:

- Kurangnya dana untuk mendanai operasional dan investasi modal.
- Kurangnya sumber daya manusia berketerampilan tinggi.
- Kurangnya akses kepada teknologi canggih.
- Kurangnya informasi terbaru (*up-to-date*) dan komprehensif.
- Kesulitan dalam pengadaan bahan mentah dan prasyarat (*input*) lainnya.
- Kesulitan dalam pemasaran dan distribusi.
- Biaya transportasi yang tinggi.
- Prosedur birokrasi yang rumit dan mahal, khususnya dalam mendapatkan perizinan.
- Kebijakan dan regulasi yang menyebabkan distorsi pasar.

Tabel 1 merupakan ringkasan data survei tentang hal-hal yang dilaporkan usaha kecil di Indonesia di bidang industri manufaktur tentang hambatan paling signifikan yang dihadapi pada tahun 2005 dan 2010. Harga dan pasokan energi dilaporkan menjadi masalah yang signifikan, walaupun juga merupakan yang paling jarang disebut sebagai hambatan utama yang penting di antara tujuh hal yang diajukan dalam survei, dan responden yang menjawab hal tersebut sebagai masalah serius berkurang jumlahnya di tahun 2010 dibandingkan dengan 2005.

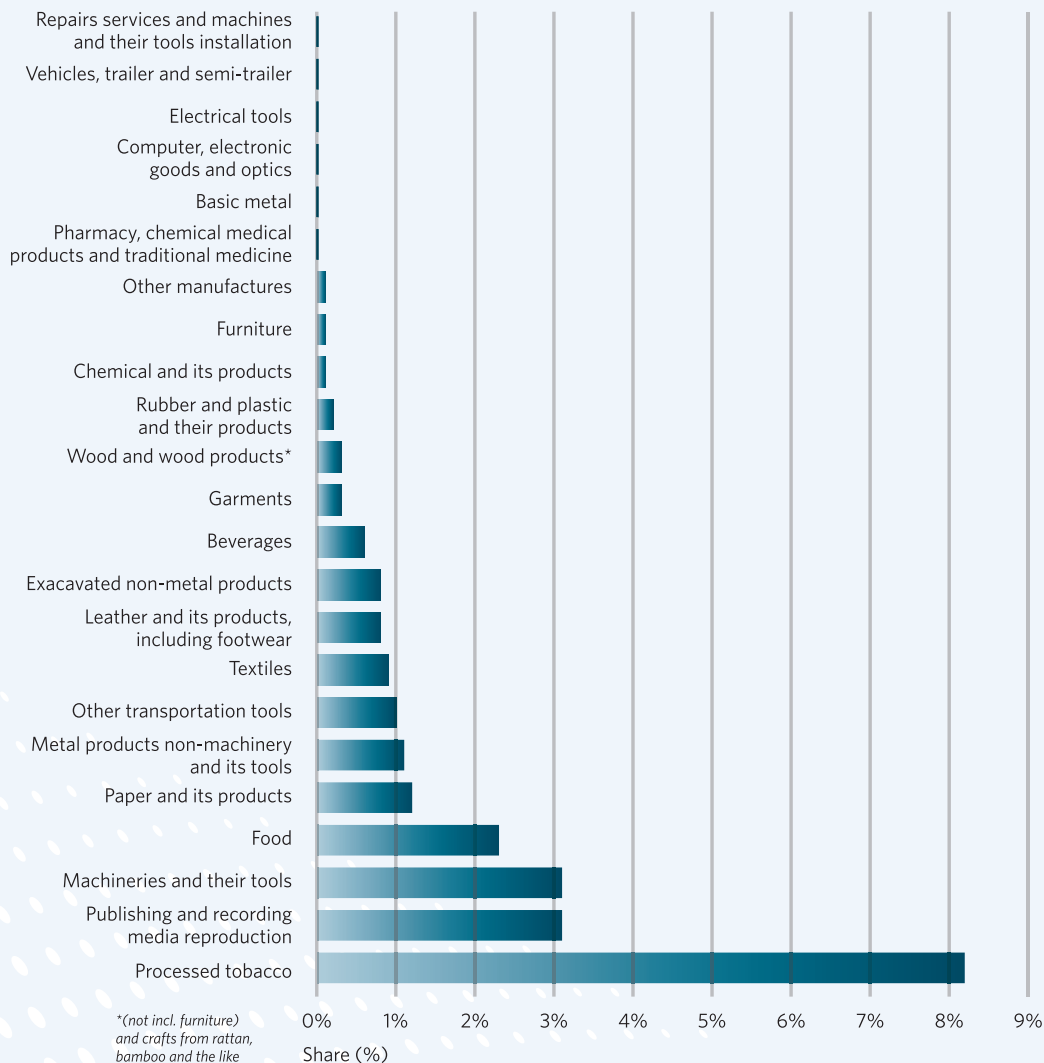
**TABEL 1: HAMBATAN UTAMA BAGI USAHA KECIL DI BIDANG MANUFAKTUR DALAM MENJALANKAN USAHA, 2005 & 2010**

Status	2005		2010	
	Jumlah perusahaan	%	Jumlah perusahaan	%
Tidak ada hambatan berarti	674.135	24,7	599.591	21,94
Ada hambatan berarti	2.054.565	75,3	2.133.133	78,06
Total responden	2.728.700	100,00	2.732.724	100,00
Hambatan serius yang ditemukan	Jumlah perusahaan	%	Jumlah perusahaan	%
Kurangnya modal	714.629	34,78	806.538	37,81
Kesulitan pemasaran	629.406	30,63	495.100	23,21
Kurangnya pasokan atau harga bahan mentah yang tinggi	421.277	20,5	483.581	22,67
Hambatan utama lainnya	162.238	7,9	184.516	8,65
Tingginya biaya pekerja atau kurangnya pekerja terampil	16.650	0,8	88.952	4,17
Hambatan transportasi/distribusi	54.945	2,67	39.676	1,86
Tingginya harga atau kurangnya pasokan energi	55.420	2,7	34.770	1,63
<b>Responden total</b>	<b>2.054.565</b>	<b>100,00</b>	<b>2.133.133</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Tambunan (2008); Badan Pusat Statistik (BPS) (2010a).



Data juga menunjukkan bahwa proporsi usaha kecil yang mengungkapkan harga atau pasokan energi sebagai masalah paling utama yang mereka hadapi berbeda-beda, bergantung pada kelompok industri. Hal ini kemungkinan terkait dengan perbedaan cara beroperasi mereka, seperti sifat proses produksinya. Gambar 1 menunjukkan bahwa jika dilihat dari persentase perusahaan manufaktur secara total, energi merupakan poin yang paling sering disebut sebagai masalah paling utama bagi usaha-usaha kecil di bidang pengolahan tembakau, disusul dengan usaha yang memanufaktur reproduksi media penerbitan atau perekaman; mesin dan peralatan; makanan, serta kertas dan produk-produk turunannya.



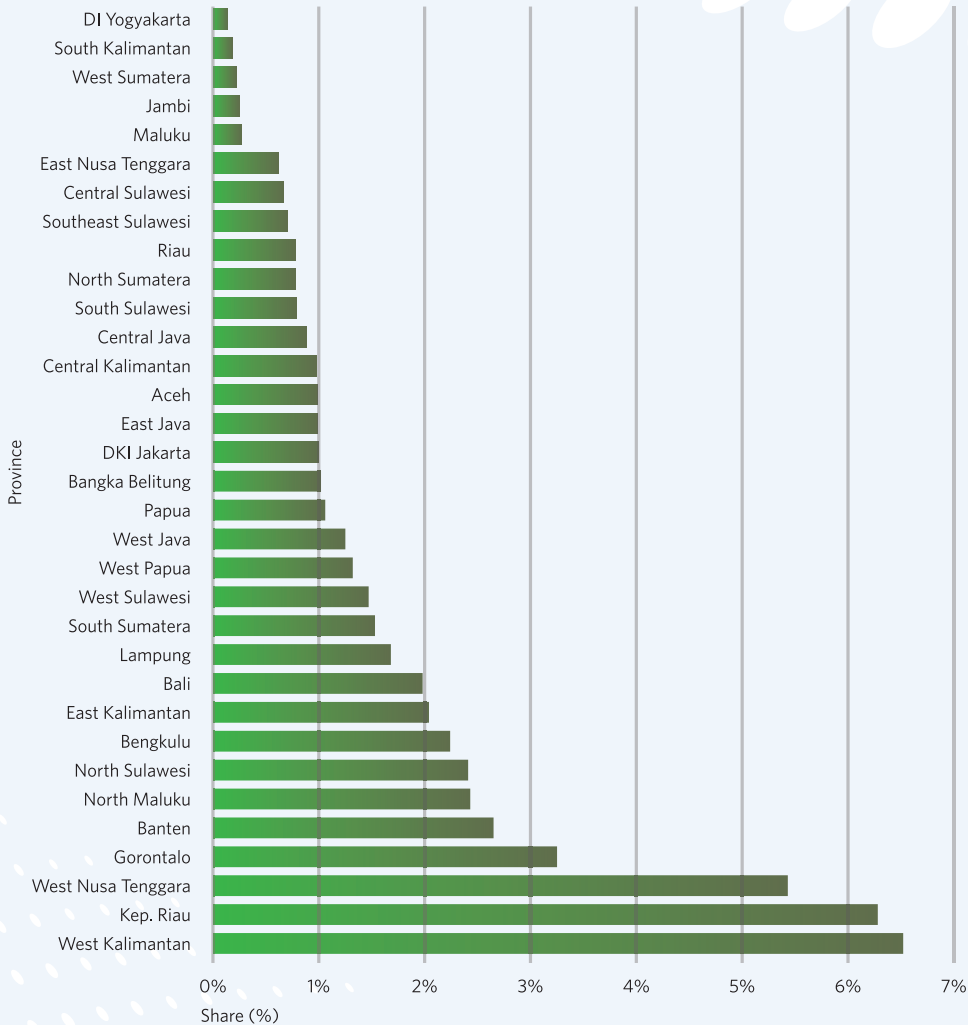
**GAMBAR 1: PROPORSI PERUSAHAAN MANUFAKTUR KECIL YANG MEMANDANG ENERGI SEBAGAI HAMBATAN UTAMA BERDASARKAN KELOMPOK INDUSTRI, 2010**

*\* Termasuk kerajinan dari rotan, bambu dan sejenisnya, tidak termasuk furnitur.  
Sumber: BPS (2010a).*



Variasi ini juga dapat terkait dengan isu-isu seperti lokasi geografis, kondisi pasar energi lokal dan jaringan transportasi lokal. Sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2, tampak jelas bahwa kebanyakan usaha kecil yang menghadapi masalah ini berada di luar Jawa dan Sumatera. Secara khusus, Gambar 2 menunjukkan lima provinsi di mana biaya energi menjadi masalah terbesar, yaitu Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo dan Banten.

**GAMBAR 2: PROPORSI USAHA KECIL MANUFAKTUR YANG MEMANDANG ENERGI SEBAGAI HAMBATAN**



**UTAMA BERDASARKAN PROVINSI, 2010**

Sumber: BPS (2010a).

Namun data yang tersedia juga menimbulkan banyak pertanyaan. BPS hanya menjabarkan data di industri manufaktur.<sup>1</sup> Sementara itu tidak ada data untuk UKM di industri lain. Selain itu, data tersebut juga tidak membedakan antara masalah-masalah biaya dan pasokan energi, serta tidak menunjukkan secara spesifik sumber energi yang mana (mis. Listrik, LPG, minyak tanah) yang menyebabkan masalah paling signifikan bagi berbagai jenis UKM yang berbeda.

<sup>1</sup> Termasuk data tentang usaha menengah (UM), tersedia dari data terbitan BPS lainnya (Statistik Usaha Menengah dan Besar), walaupun tidak disebutkan di sini.



Informasi tersebut krusial untuk meneliti dampak reformasi subsidi bahan bakar fosil. Energi yang digunakan akan bervariasi secara signifikan berdasarkan tipe perusahaan: misalnya, kerajinan tangan akan menghadapi biaya transportasi yang tinggi, namun tidak menghadapi masalah di sisi listrik; industri lain seperti pengolahan makanan akan menggunakan minyak tanah dalam jumlah besar. Karenanya dapat disimpulkan bahwa reformasi harga bensin dan solar seperti yang dilaksanakan pada bulan Juni 2013 hanya mempengaruhi beberapa kelompok UKM saja, seperti yang bergerak di industri tradisional seperti makanan dan minuman, atau industri yang membuat produk dari kayu, bambu dan rotan, serta produk kulit. Pada industri-industri tersebut, jenis energi utama yang digunakan oleh UKM adalah minyak tanah, disusul oleh solar dan bensin. Data yang terpercaya masih diperlukan untuk dapat memprediksi dampak-dampak reformasi secara akurat serta memastikan kesiapan UKM dalam menghadapinya.

## Arti Penting Energi dalam Struktur Biaya UKM

Meskipun umum diketahui bahwa UKM, khususnya usaha kecil, bukan usaha padat energi (*energy-intensive*) seperti perusahaan besar, biaya energi masih signifikan yang berkisar dari 10 persen hingga lebih dari 65 persen total biaya produksi (United States Agency for International Development (USAID), 2008).

Untuk usaha-usaha kecil (termasuk perusahaan mikro), tidak terdapat data nasional terkait struktur biaya atau komposisi *input* yang digunakan. Namun terdapat sejumlah penelitian yang didasarkan pada survei lapangan yang menunjukkan bahwa biaya energi bukan merupakan komponen terbesar biaya produksi total untuk usaha kecil di Indonesia, meskipun persentasenya bervariasi berdasarkan kelompok industri.

Data survei dari BI & PS-IUKMPU (2010) yang disajikan secara ringkas pada Tabel 2 menunjukkan bahwa biaya operasi hanya merupakan komponen kecil biaya produksi total untuk usaha kecil di bidang pengolahan kayu, makanan dan minuman, serta industri tekstil dan alas kaki di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, Jawa Barat dan Jawa Timur. Biaya operasi mencakup biaya energi, meskipun energi belum tentu menjadi komponen dominan dalam biaya operasi. Misalnya, dalam industri pengolahan kayu, biaya energi membentuk sekitar 13,55 persen dari total biaya operasi. Di industri lain proporsinya lebih tinggi, seperti industri makanan dan minuman, di mana biaya bahan bakar merupakan 42,4 persen dari biaya operasional. UKM di industri makanan dan minuman menggunakan boiler sebagai sumber uap untuk proses produksinya. Batu bara, solar dan minyak adalah bahan bakar yang umum digunakan untuk mengoperasikan *boiler*, yang akhirnya menyebabkan biaya produksi yang tinggi.

**TABEL 2: STRUKTUR BIAYA USAHA KECIL DI KELOMPOK INDUSTRI YANG DIPILIH**

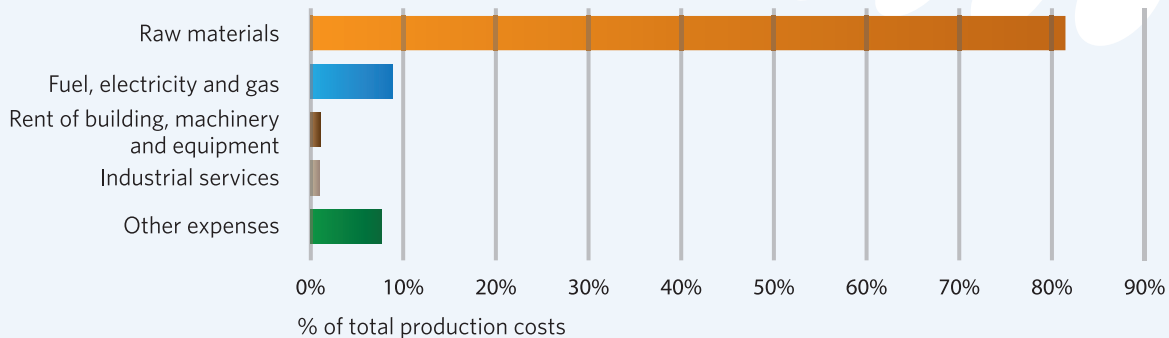
KELOMPOK INDUSTRI YANG DIPILIH	% PROPORSI				
	BAHAN MENTAH UTAMA	BAHAN PENDUKUNG	TENAGA KERJA	OPERASIONAL	MODAL
Pengolahan kayu	64,07	4,42	26,40	4,48	0,63
Makanan dan minuman	69,9	11,6	11,2	5,9	1,4
Tekstil	63,2	7,69	21,51	5,78	1,82
Alas kaki	56,6	10,3	27,0	4,1	2,0

Sumber: BI & PS-IUKMPU (2010).





Data nasional untuk Usaha Menengah terkait dengan industri manufaktur dapat ditemukan di Statistik Industri Menengah dan Besar yang dikeluarkan BPS setiap tahunnya. Sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3, data-data ini menunjukkan bahwa energi bukan merupakan komponen terbesar biaya produksi total usaha menengah, namun hal ini bervariasi bergantung pada kelompok industri, dan antara lain ditentukan oleh sifat proses produksi dan upaya efisiensi energi yang dijalankan oleh masing-masing perusahaan di industri tersebut.



### **BELAJAR DARI PENGALAMAN: BAGAIMANA UKM MENGHADAPI PENINGKATAN HARGA ENERGI BELAKANGAN INI?**

Sumber: BPS (2010b).

#### **Belajar dari Pengalaman: Bagaimana UKM Menghadapi Peningkatan Harga Energi Belakangan Ini?**

Bahkan jika energi merupakan persentase kecil dari biaya produksi usaha kecil sebagaimana diperlihatkan di atas, peningkatan biaya energi tetap dapat berdampak serius terhadap usaha kecil. Kerentanan usaha kecil terhadap peningkatan harga energi hingga skala tertentu ditentukan oleh kemampuan usaha tersebut menghadapi perubahan: apakah mereka dapat membebankan biaya tambahan kepada konsumen mereka, atau apakah mereka yang harus menanggung kerugiannya?

Kemampuan suatu usaha untuk membebankan biaya sepenuhnya atau sebagian kepada konsumen akan bergantung pada jenis barang yang diproduksi serta jenis pasar yang mereka layani. Usaha kecil yang memproduksi barang-barang kebutuhan pokok seperti warung makan kecil yang menjadi andalan kelompok berpendapatan rendah harus menghadapi permintaan konsumen yang relatif tidak elastis. UKM yang menjual barang-barang yang bukan kebutuhan pokok dengan permintaan yang elastis seperti furnitur, mainan, atau pakaian, akan relatif lebih sulit membebankan biaya ekstra kepada konsumen.

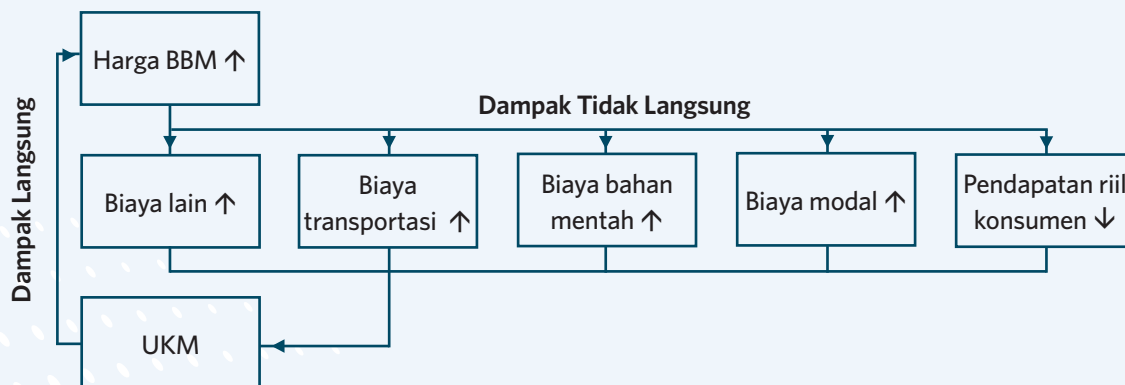
Pada saat makalah ini ditulis, belum ada penelitian mendetil yang diterbitkan mengenai dampak reformasi harga bensin dan solar pada Juni 2013 terhadap UKM. Akan tetapi, laporan anekdot dari berbagai surat kabar menunjukkan dampaknya tampak signifikan. Misalnya, Republika menyatakan bahwa banyak UKM di Sukabumi, Jawa Barat, harus gulung tikar karena kebijakan reformasi subsidi bahan bakar (Republika Online, 2013a). Antara News (2013b) mengutip keluhan bahwa kenaikan biaya produksi membuat perusahaan sulit berekspansi, dan dinyatakan pula bahwa perubahan harga dirasakan oleh banyak UKM di Jawa Timur, dan bahkan telah mengancam sejumlah usaha bangkrut. Di Kota Malang, Jawa Timur, setidaknya 10.000 UKM lokal menghadapi risiko kebangkrutan karena kenaikan biaya operasional yang tajam (khususnya biaya transportasi) yang menyusul perubahan harga bahan bakar (Antara News, 2013b).



Menurut Harian Kompas, Kementerian Koperasi dan UKM dan BPS telah memperkirakan bahwa dampak reformasi harga bahan bakar telah mengakibatkan masalah keuangan bagi banyak UKM di Indonesia (Purwanto, 2013). Menurut penelitian tersebut, meskipun peningkatan biaya produksi tidak separah tahun 2005, ketika biaya bahan bakar pertama kali dinaikkan, hal ini masih mengakibatkan masalah signifikan bagi banyak UKM (Antarnews.com, 2013a, 2013b).

Penelitian tentang reformasi harga energi 2005 pada UKM menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Misalnya, studi kasus di Sumatra Utara pada 2007 menunjukkan bahwa kinerja usaha UKM lokal tidak terdampak signifikan oleh kenaikan harga bahan bakar pada 2005 (Rizal, 2007). Temuan lainnya seperti yang didapat dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada 2006 (dikutip di Sinaga, 2013), menunjukkan bahwa biaya produksi dan pendapatan terdampak signifikan. Survei ini melibatkan 37.950 UKM di 33 provinsi yang menggunakan minyak tanah, minyak solar dan bensin di berbagai jenis usaha, termasuk industri pengolahan makanan, penggilingan padi (*rice milling*), perikanan, warung makan, batik, industri yang memproduksi materi bangunan sederhana seperti lantai dan batu bata, serta transportasi kota. Survei tersebut menunjukkan bahwa biaya produksi meningkat rata-rata 28,1 persen – pada perusahaan mikro sebesar 34 persen; di perusahaan kecil sebesar 24,6 persen; di perusahaan menengah sebesar 29,6 persen – dan pendapatan bersih turun sebesar 18,37 persen. Terkait dengan strategi untuk menghadapinya, survei tersebut menunjukkan bahwa sekitar 76,8 persen total UKM yang disurvei menaikkan harga jual mereka; 45,4 persen mengurangi ukuran dan kuantitas produk; 63,6 persen menurunkan kualitas produk; 39,7 persen mengurangi margin keuntungan; 39,7 persen meningkatkan efisiensi biaya produksi; dan 6,11 persen menggunakan strategi “lain” selain di atas.

Secara umum, pengalaman menunjukkan bahwa dampak peningkatan harga bahan bakar terhadap UKM terjadi melalui saluran langsung dan tidak langsung (lihat Gambar 4).



**GAMBAR 4: SALURAN LANGSUNG DAMPAK PENINGKATAN HARGA BAHAN BAKAR TERHADAP UKM**

## Dampak Langsung

Dampak langsung meningkatkan biaya operasional total UKM karena mereka harus membayar energi lebih besar. Tingkat kenaikan akan bervariasi berdasarkan kelompok industri, sesuai jumlah energi dan jenis energi yang mereka konsumsi.

Misalnya, UKM yang memproduksi roti akan sangat bergantung pada gas untuk menyalakan oven, sehingga biaya energi membentuk 7-8 persen dari total biaya produksi roti. Setiap hari, toko-toko roti mengkonsumsi rata-rata tiga





tabung LPG 12 kg. Ketika pemerintah mengumumkan rencana untuk meningkatkan harga gas LPG 12 kg pada awal Maret 2013 dari Rp. 70.200 menjadi Rp.95.600 – berarti total naik sebesar Rp. 25.400 (atau 35 persen) – Asosiasi Pengusaha Roti Indonesia menyatakan kebijakan itu akan meningkatkan biaya produksi roti sebesar 2 persen. Jika menghitung peningkatan biaya listrik baru-baru ini, maka total biaya energi keseluruhan meningkat sebesar 10 persen (Citra Indonesia, 2013).

Peningkatan biaya operasional total yang disebabkan kenaikan harga bahan bakar juga bergantung pada jenis mesin yang digunakan, dan mungkin lebih penting lagi, upaya penyesuaian yang diambil oleh produsen dalam menghadapi perubahan harga, yang akan menentukan efisiensi penggunaan bahan bakar.

## Dampak Tidak Langsung

Di sisi lain, dampak tidak langsung muncul melalui efek sekunder (knock-on) yang disebabkan kenaikan harga energi terhadap aspek lain dari UKM, seperti misalnya peningkatan biaya input lain atau penurunan pendapatan riil konsumen, yang mengakibatkan penurunan permintaan, sebagaimana digambarkan pada Gambar 4.

Dampak tidak langsung terhadap UKM umumnya diperkirakan lebih signifikan daripada dampak langsungnya. Bank Indonesia memprediksi inflasi tahunan di 2013 dapat mencapai 7,9 persen, melampaui perkiraan pemerintah yang sebesar 7,2 persen, sebagai akibat peningkatan biaya bahan bakar minyak bersubsidi (Berita 2 Bahasa, 2013). Dampak inflasi langsung dan tidak langsung dari reformasi harga pada Juni 2013 diperkirakan sebesar 2,45 persen, yang terdiri dari sub-komponen berikut: dampak tidak langsung terhadap biaya transportasi publik dan komoditas (makanan dan barang pokok lainnya) berkontribusi masing-masing sebesar 0,82 persen dan 0,40 persen; serta dampak langsung berkontribusi sebesar 1,23 persen. Menurut Bank Indonesia, dampak ini akan bertahan selama tiga bulan, khususnya dalam biaya transportasi publik (Berita 2 Bahasa, 2013).

Dampak kenaikan harga energi terhadap biaya bahan mentah dan komoditas input usaha dapat signifikan. Misalnya, pada 2008, Majalah Tempo mengumumkan bahwa kenaikan harga bahan bakar di akhir Mei mengakibatkan tutupnya ribuan UKM di kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (Asia Pacific Solidarity Network [APSN], 2008). Sekitar 50 persen dari 17.353 UKM di wilayah ini telah gulung tikar karena bangkrut, termasuk warung makan, industri kerajinan tangan dan industri rumah tangga (*cottage*), khususnya yang memproduksi kerupuk, tempe dan tahu. Banyak UKM yang tutup karena kenaikan harga bahan dasar, biaya transportasi publik dan biaya produksi, sementara yang tidak tutup masih berjuang keras untuk bertahan dengan masa depan yang suram (APSN, 2008).

Dampak tidak langsung terhadap kredit juga dapat bersifat serius. Sebagai tanggapan terhadap kenaikan inflasi dan terus terdepresiasi rupiah, otoritas moneter Indonesia memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga Bank Indonesia dari 5,75 persen pada bulan Mei 2013 menjadi 6,0 persen pada bulan Juni dan kembali naik hingga 6,5 persen di bulan Juli (Bank Indonesia, 2013). Kenaikan biaya kredit ini membuat UKM yang bergantung pada pinjaman bank menjadi kesulitan, meskipun jenis UKM seperti ini relatif minoritas. Lebih lanjut, hal ini akan berdampak pada usaha lebih besar yang bergantung pada kredit dan memiliki hubungan dengan UKM (mis. perusahaan dagang dan produsen mobil besar). Jika perusahaan-perusahaan tersebut mengalami masalah keuangan yang disebabkan tingkat suku bunga yang tinggi, dan karenanya harus mengurangi produksi atau bahkan tutup, maka UKM subkontraktor atau yang terkait dengan usaha tersebut juga akan merasakan akibatnya.

Kemungkinan dampak tidak langsung paling serius terhadap UKM adalah penurunan daya beli di kalangan kelompok berpendapatan rendah. Meskipun data tentang jumlah pembeli barang dan jasa UKM berdasarkan tingkat pendapatan belum tersedia, para pelanggan utama UKM berasal dari rumah tangga berpendapatan rendah,



mengingat sebagian besar UKM di Indonesia (sebagaimana di kebanyakan negara berkembang) menghasilkan barang dan jasa murah. Bahkan jika rumah tangga berpendapatan rendah tersebut tidak mengeluarkan pendapatan mereka untuk bahan bakar secara langsung, mereka diperkirakan akan tetap terdampak serius oleh reformasi subsidi, mengingat harga barang dan jasa termasuk ongkos transportasi juga meningkat akibat kenaikan harga bahan bakar. Menyusul kenaikan harga bensin dan solar pada bulan Juni 2013, Kementerian Perdagangan memperkirakan bahwa harga barang pokok dan jasa akan meningkat minimal 5 persen dan maksimal 10 persen, atau rata-rata sekitar 8,2 persen (Setiawan, Laoli, Prayogo, Werdiningsih, & Himawan, 2013). Namun dalam kenyataannya, dampak riilnya dapat lebih buruk. Menurut Organisasi Sarana Angkutan Darat (ORGANDA), ongkos transportasi dapat naik hingga 35 persen (Republika Online, 2013b), meskipun pemerintah menetapkan kenaikan maksimal tidak boleh melebihi 20 persen (Setiawan et al., 2013).

Menurut BAPPENAS, perubahan harga terakhir akan meningkatkan tingkat kemiskinan dari 10,5 persen pada 2012 menjadi 12,1 persen pada 2013, yang berarti terdapat kenaikan sebesar 1,6 persen meskipun pemerintah sudah menyediakan dana kompensasi. Ini akan meningkatkan jumlah total masyarakat miskin dari 26,3 juta orang menjadi sekitar 30,3 juta (Purwanto, 2013). Kementerian Keuangan melaporkan bahwa elastisitas inflasi garis kemiskinan adalah sebesar 1,3 persen. Dengan kata lain, jika harga naik sebesar 10 persen, garis kemiskinan akan naik sebesar 13 persen untuk mencerminkan naiknya pengeluaran untuk jumlah konsumsi minimal (Deli, 2013). Penelitian lain yang dilakukan pada 2013 oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM ? Institute for Social and Economic Research) Universitas Indonesia menunjukkan bahwa dalam 10 skenario kenaikan harga dan skema sasaran yang ada, di mana kenaikan paling ekstrem adalah 56 persen untuk seluruh konsumen, guncangan tersebut akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,86 hingga 2,04 persen (Wikarya, 2013).

Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa setelah reformasi subsidi 2005, di mana harga bahan bakar naik sebesar 30 persen, jumlah total masyarakat miskin meningkat dari 35,1 juta (16,0 persen) pada Februari 2005 menjadi 39,05 (17,75 persen) pada Maret 2006, yang berarti kenaikan sebesar 4 juta orang (Bappenas, 2006). Namun harus diingat bahwa fluktuasi dalam jumlah masyarakat miskin sepanjang 2005 dan 2006 dihasilkan berbagai faktor dan tidak hanya kenaikan 30 persen harga bahan bakar, serta tren jangka menengah di Indonesia telah menunjukkan penurunan signifikan masyarakat miskin, dengan jumlah masyarakat miskin sebesar 10,5 persen pada 2012. Untuk mencegah dampak tidak langsung terhadap UKM dan lapangan kerja UKM serta dampak terkait lainnya (*feedback effect*) terhadap kesejahteraan warga termiskin, kita harus lebih memahami dampak reformasi subsidi bahan bakar terhadap masyarakat miskin dan cara mencegah kenaikan tingkat kemiskinan yang disebabkan olehnya secara keseluruhan.



## ***Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan***

Dalam mengkaji hubungan antara reformasi subsidi bahan bakar fosil dan UKM, makalah ini memiliki tiga pesan kunci:

1. **Secara umum, UKM tidak padat-energi (*energy-intensive*) sebagaimana usaha besar, namun UKM juga lebih rentan.** Ini berarti dampak keuangan langsung kenaikan harga energi pada UKM tidak akan seserius dampaknya terhadap usaha besar; namun kapasitas UKM untuk menghadapi setiap dampak negatif kemungkinan jauh lebih rendah. Dampak negatif kecil sekalipun dapat berdampak jauh lebih serius bagi UKM.
2. **UKM amat beragam dan data yang ada saat ini masih jauh dari cukup untuk memprediksi secara mendetil bagaimana penentuan harga energi akan berdampak pada berbagai sektor atau kelompok industri.** UKM amat beragam dalam berbagai segi, termasuk sifat proses produksi, struktur biaya, margin keuntungan, keamanan keuangan, permintaan pasar, dan kapasitas mereka untuk menyesuaikan diri dengan kenaikan harga. Saat ini tidak ada data untuk membantu memprediksi jenis UKM apa yang akan terdampak paling serius oleh perubahan harga energi. Jenis bisnis seperti apa yang akan paling terdampak oleh kenaikan harga bensin, solar, LPG atau listrik? Untuk saat ini, bukti anekdot menunjukkan bahwa secara historis, reformasi atas subsidi bensin paling berdampak serius terhadap UKM yang terkait dengan industri pengolahan makanan, penggilingan padi, perikanan, warung makan, bahan bangunan (seperti lantai dan batu bata), dan transportasi kota. tampak jelas pula bahwa tantangan ini khususnya dihadapi di Indonesia Timur, di mana harga energi tinggi karena transportasi bahan bakar yang jauh dan kurang memadainya infrastruktur setempat (mis. Jalan dari pelabuhan ke pusat kegiatan ekonomi lokal/UKM). Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk dapat meneliti isu ini lebih mendetil dan untuk mengajukan mekanisme tertarget untuk mendukung UKM yang rentan selama reformasi harga.
3. **Dampak tidak langsung kenaikan harga energi dapat berdampak paling serius terhadap UKM khususnya melalui biaya transportasi, bahan mentah dan modal.** Hal ini disebabkan tiga alasan. Pertama, UKM secara umum tidak sepadat energi perusahaan besar (artinya juga tidak intensif bahan bakar), sehingga dampak langsungnya relatif kecil. Kedua, semua perusahaan sebesar apapun bergantung pada setidaknya transportasi darat, yang merupakan fokus utama reformasi subsidi bahan bakar fosil di Indonesia. Ketiga, UKM Indonesia, khususnya usaha kecil, amat bergantung pada rumah tangga berpendapatan rendah sebagai pembeli utama mereka, dan kelompok ini khususnya adalah yang paling terdampak serius oleh kenaikan harga bahan bakar dan inflasi yang terkait dengannya, yang menurunkan pendapatan mereka dan menyebabkan penurunan permintaan pasar.

Tentunya tidak lagi perlu memperdebatkan mengapa pemerintah memutuskan memotong subsidi bahan bakar, karena hal itu disebabkan skala pengeluaran subsidi yang tidak dapat dipertahankan, serta karena subsidi bahan bakar yang sejatinya untuk membantu kelompok berpendapatan rendah ternyata tidak tepat sasaran. Akan lebih baik jika pemerintah dan UKM mengambil tindakan-tindakan berikut untuk mengkompensasi masalah-masalah yang dapat disebabkan oleh reformasi subsidi bahan bakar fosil.



Dari sisi pemerintah:

1. **Meningkatkan akses kepada pembiayaan bank untuk UKM yang layak bisnis, khususnya yang berpotensi besar berkontribusi terhadap PDB dan ekspor di masa mendatang.** Misalnya, ini dapat mencakup UKM yang terkait dengan tekstil dan garmen, makanan dan minuman, produk kulit, produk kayu (khususnya furnitur), barang kreatif dan kerajinan tangan.
2. **Menghilangkan prosedur birokratis yang tidak perlu untuk mengurangi waktu yang dihabiskan dan mahal biaya terkait pengurusan perizinan bagi UKM.** Ini dapat mencakup izin mengimpor bahan mentah dan mengekspor barang dan jasa.
3. **Merealokasikan sejumlah dana yang dihasilkan dari reformasi subsidi untuk mengembangkan infrastruktur dan fasilitas transportasi publik, khususnya di wilayah pedesaan di mana sebagian besar UKM berada.** Infrastruktur dan fasilitas transportasi publik yang baik akan membantu UKM membeli bahan mentah dan memasarkan produknya. Dana tersebut juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah utama UKM lainnya, misalnya untuk berinvestasi di pendidikan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil untuk jangka menengah yang dibutuhkan UKM untuk tumbuh dan berekspansi. Dana ini dapat direalokasikan secara lebih umum untuk membantu melaksanakan kebijakan pemerintah yang telah ada selama ini dalam mendukung UKM, yang mencakup pengembangan SDM, kewirausahaan dan pembiayaan.
4. **Mendukung UKM memperbaiki efisiensi mereka dalam menggunakan energi.** Misalnya, UKM dapat diberikan bantuan teknis dan keuangan untuk mengidentifikasi peluang untuk memperbaiki efisiensi dan memodernisasi sistem produksi mereka.
5. **Membantu UKM menggunakan energi alternatif.** Secara umum, UKM memerlukan teknologi yang tidak mereka miliki. Karenanya amat penting untuk mendukung transfer teknologi dengan berbagai mitra seperti universitas, perusahaan besar, organisasi non-pemerintah serta lembaga pemerintah. Banyak isu yang harus diselesaikan agar dapat menjalankan transfer dan pengembangan teknologi yang efektif untuk mengembangkan energi alternatif, termasuk pengembangan kelembagaan, informasi, kemitraan dan pembangunan jaringan (*networking*), penelitian dan pengembangan kolaboratif, hak atas kekayaan intelektual, pembiayaan dan infrastruktur.

UKM juga bertanggung jawab mengambil tindakan persiapan dengan menerapkan setidaknya dua hal berikut:

1. **Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk beradaptasi dengan kenaikan harga energi dengan meningkatkan efisiensi energi.** Misalnya, dengan menggunakan metode yang lebih efisien untuk memanaskan atau mengolah makanan.
2. **Mencari solusi jangka panjang untuk kenaikan biaya energi.** Hal ini dapat mencakup penggunaan energi alternatif atau mengembangkan energi terbarukan. Demi efisiensi dan dengan mempertimbangkan kapasitas banyak UKM, tindakan ini harus dijalankan dengan kerja sama antar UKM atau dengan para aktor masyarakat lokal seperti universitas atau pun organisasi non-pemerintah. Salah satu tindakan yang mungkin dilakukan adalah UKM dapat menghasilkan listrik sendiri dengan pembangkit kecil atau terbarukan seperti angin, matahari, sistem mikro-hidro maupun biofuel yang dapat bertahan lama (*sustainable*). Di banyak tempat, elektrifikasi dari energi biomassa telah terbukti membantu pengembangan UKM di wilayah seperti penguapan gabah/beras pra-tanak (*rice parboiling*), atap rumah (*roofing tiles*) dan pengawetan tembakau (*curing tobacco*).



## Referensi

Antara News. (2013a). *Dampak Kenaikan BBM Mulai Dirasakan UKM*. Retrieved from <http://www.antaranews.com/print/31582/%20dampak-kenaikan-bbm-mulai-dirasakan-ukm>

Antara News, (2013b). *Pendapatan UMKM Turun 4,16% Akibat Kenaikan BBM*. Retrieved from <http://www.antaranews.com/print/103873/>

Asia Pacific Solidarity Network (APSN). (2008, June 4). *50 percent of SMEs in Tangerang collapse following fuel price hikes*. Retrieved from [http://www.asia-pacific-solidarity.net/southeastasia/indonesia/indoleft/2008/tempo\\_50percentsmescollapse\\_050608.htm](http://www.asia-pacific-solidarity.net/southeastasia/indonesia/indoleft/2008/tempo_50percentsmescollapse_050608.htm)

Badan Pusat Statistik (BPS). (2010a). *Profil Industri Mikro dan Kecil 2010 (Profile of Micro and Small Industry)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS. (2010b). *Statistik Industri Besar dan Sedang (Statistics of Medium and Large Industries)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bank Indonesia & Pusat Studi Industri, UKM dan Persaingan Usaha. (2010). *Struktur Biaya Produksi Usaha Mikro dan Kecil [Production cost structure of micro and small enterprises]*. Laporan Penelitian, Tim Peneliti, Desember, Jakarta.

Bank Indonesia. (2013, July 11). *BI-rate raised by 50 bps to 6.50%*. Retrieved from [http://www.bi.go.id/web/en/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp\\_151413\\_dkom.htm](http://www.bi.go.id/web/en/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp_151413_dkom.htm)

Bappenas. (2006). *Bab 1 Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2006*. Retrieved from [http://www.bappenas.go.id/files/4113/5228/3386/bab\\_\\_20081122141425\\_\\_775\\_\\_2.pdf](http://www.bappenas.go.id/files/4113/5228/3386/bab__20081122141425__775__2.pdf)

Berita 2 Bahasa. (2013, June 24). *Bank Indonesia: Inflasi 2013 Kiperkirakan Capai 7,9%* [Bank Indonesia: Inflation Could Rise to 7.9%]. Retrieved from <http://berita2bahasa.com/berita/01/1862406-bank-indonesia-inflasi-2013-diperkirakan-capai-7-9#>

Citra Indonesia. (2013, February 21). *Harga Gas 12kg Naik, SMEs Bread Objection*. Retrieved from <http://citraindonesia.com/harga-gas-12kg-naik-ukm-roti-keberatan/?lang=en>

Deli, A. (2013). *Menghitung Dampak Kenaikkan Harga BBM [Calculating the impact of the increase in BBM price]*. Serambi Indonesia. Retrieved from <http://aceh.tribunnews.com/2013/06/25/menghitung-dampak-kenaikan-harga-bbm>

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (UKM). (2013). *Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2011-2012 [Data for Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) and Large Enterprises (LE) Year 2011-2012]*. Retrieved from [http://www.depkop.go.id/index.php?option=com\\_phocadownload&view=file&id=335:data-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-dan-usaha-besar-ub-tahun-2011-2012&Itemid=93](http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=335:data-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-dan-usaha-besar-ub-tahun-2011-2012&Itemid=93)

Purwanto, D. (2013, May 27). *Harga BBM Naik, Jumlah Orang Miskin Naik Jadi 30 Juta* [Price of BBM increases, total number of poor people increases to 30 million]. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/05/27/22064348>

Republika Online. (2013a). *BBM Naik, UKM Sukabumi Terancam Terpuruk*. Retrieved from <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/mikro/13/06/20/mool0w-bbm-naik-ukm-sukabumi-terancam-terpuruk>





Republika Online. (2013b). *Organda Palu Segera Bahas Kenaikan Tarif Angkot*. Retrieved from <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/06/18/mol8bk-organda-palu-segera-bahas-kenaikan-tarif-angkot>

Rizal, M. (2007). *Analisis Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Tingkat Inflasi dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (Studi Empiris Pada Perusahaan Kecil dan Menengah)* [Analysis of the impact of the increase in fuel (BBM) price on inflation rate and poverty in the province of North Sumatera (empirical study on small and medium enterprises)]. Lembaga Riset Publik. Retrieved from <http://www.larispa.or.id/publikasi/artikel/138-penelitian-analisis-dampak-kenaikan-harga-bahan-bakar-minyak-bbm-tingkat-inflasi-dan-kemiskinan-di-propinsi-sumatera-utara-studi-empiris-pada-perusahaan-kecil-dan-menengah-.html>

Setiawan, Diky, Noverius Laoli, Oginawa R. Prayogo, RR Putri Werdiningsih, and Adhitya Himawan (2003). *Harga BBM naik, rakyat kian tercekik*, 18 June, Focus, Kontan online. Retrieved from <http://fokus.kontan.co.id/news/harga-bbm-naik-rakyat-kian-tercekik>.

Sinaga, P. (2013). *Harga BBM dan UKM* [BBM price and SMEs]. *Koran Jakarta*, Kolom, Gagasan. Retrieved from [http://m.koran-jakarta.com/index.php?id=122522&mode\\_beritadetail=1](http://m.koran-jakarta.com/index.php?id=122522&mode_beritadetail=1)

Tambunan, T. (2008, April). Development of SME in ASEAN with Reference to Indonesia and Thailand. *Journal of Economics* 20(1), 53–83.

United States Agency for International Development (USAID). (2008). *Energy and small and medium enterprises*. Retrieved from [http://www.energyandsecurity.com/images/3\\_Small\\_and\\_Medium\\_Enterprise.pdf](http://www.energyandsecurity.com/images/3_Small_and_Medium_Enterprise.pdf)

Wikarya, U. (2013). *Dampak Ekonomi Kebijakan BBM Bersubsidi* [Powerpoint slides].





**GSI** Global  
Subsidies  
Initiative

**iisd** International  
Institute for  
Sustainable  
Development Institut  
international du  
développement  
durable

Published by the International Institute for Sustainable Development.

International Institute for Sustainable Development  
Head Office  
161 Portage Avenue East, 6th Floor, Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 0Y4  
Tel: +1 (204) 958-7700 | Fax: +1 (204) 958-7710 | Web site: [www.iisd.org](http://www.iisd.org)

---

## About IISD

The International Institute for Sustainable Development (IISD) contributes to sustainable development by advancing policy recommendations on international trade and investment, economic policy, climate change and energy, and management of natural and social capital, as well as the enabling role of communication technologies in these areas. We report on international negotiations and disseminate knowledge gained through collaborative projects, resulting in more rigorous research, capacity building in developing countries, better networks spanning the North and the South, and better global connections among researchers, practitioners, citizens and policy-makers.

IISD's vision is better living for all—sustainably; its mission is to champion innovation, enabling societies to live sustainably. IISD is registered as a charitable organization in Canada and has 501(c)(3) status in the United States. IISD receives core operating support from the Government of Canada, provided through the International Development Research Centre (IDRC), from the Danish Ministry of Foreign Affairs and from the Province of Manitoba. The Institute receives project funding from numerous governments inside and outside Canada, United Nations agencies, foundations and the private sector.

---

## About GSI

GSI is an initiative of the International Institute for Sustainable Development (IISD). GSI puts a spotlight on subsidies—transfers of public money to private interests—and how they impact efforts to put the world economy on a path toward sustainable development. In cooperation with a growing international network of research and media partners, GSI seeks to lay bare just what good or harm public subsidies are doing; to encourage public debate and awareness of the options that are available for reform; and to provide policy-makers with the tools they need to secure sustainable outcomes for our societies and our planet.

International Institute for Sustainable Development  
Global Subsidies Initiative  
International Environment House 2  
9 chemin de Balexert, 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland  
Tel: +41 22 917-8373 | Fax: +41 22 917-8054

**For further information contact Damon Vis-Dunbar at: [dvis-dunbar@iisd.org](mailto:dvis-dunbar@iisd.org) or +41-22-917-8848.**